

Analisis Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Dhia Nabilah¹ Syapril Abdullah²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
rismawati688@student.uir.ac.id herman@soc.uir.ac.id

Received : 2 Desember, 2024;

Accepted : 10 Desember 2024

Abstract

Governance is a systematic effort in a process to achieve organizational goals, through management principles, which include the functions of planning, implementation, control and evaluation. Village administration is the entire process of carrying out government and development activities by utilizing the capabilities of village officials and all available resources to achieve the stated goals, namely the realization of increased participation in government, development and the implementation of widespread and effective administration. The aim of this research is to find out the analysis and inhibiting factors of village government administration in Pinang Sebatang Timur Village, Tualang District, Siak Regency. The theoretical basis consists of five indicators that must be met, namely Rule of law (legal certainty), Accountability, Transparency, Professionalism and Participation. This research is field research in Pinang Sebatang Timur Village, Tualang District, Siak Regency. The data sources used are primary and secondary. Data collection methods are observation, interviews and documentation.

Keywords: Administrative Governance, Village Government, Village

Abstrak

Tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip manajemen, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi yang meluas dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis dan faktor penghambat tata kelola administrasi pemerintah desa di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Landasan teori yaitu terdiri dari lima indikator yang harus dipenuhi, yaitu Rule of law (kepastian hukum), Akuntabilitas, Transparansi, Profesionalisme dan Partisipasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata kunci: Tata Kelola Administrasi, Pemerintahan Desa, Desa

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi partisipasi, transparansi, koordinasi dan akuntabilitas serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mencapai

tata kelola pemerintahan desa yang baik harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara desa, karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang baik maka roda pemerintahan desa akan berjalan lebih efektif.

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Tata kelola meliputi semua mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana penduduk dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memnuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: (1) Partisipasi, yang dimaksud dengan partisipasi merupakan suatu sifat mental atau emosional dalam diri manusia (masyarakat desa) yang muncul secara sadar untuk melibatkan diri (personal) dalam kegiatan dan urusan pemerintahan demi membangun kesadaran bersama untuk kemajuan desa; (2) Akuntabilitas dan Transparansi (*openness and transparency*) yang dimaksud dengan akuntabilitas merupakan sebuah bentuk tanggungjawab moral dari seorang pimpinan atau kelembagaan (pemerintah desa) kepada masyarakat dalam wujud laporan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan sehingga ada transparansi yang akan memicu terbangunnya kepercayaan (*trust*) dari warga masyarakat desa; (3) *Responsive*, yang dimaksud dengan *responsive* disini menjelaskan kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu menunjukkan pada keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Siak. Desa Pinang Sebatang Timur dulunya adalah Desa Pinang Sebatang (induk), namun terjadi pemekaran pada tahun 2002 maka Desa Pinang Sebatang dibagi menjadi 3, yakni Desa Pinang Sebatang, Desa Pinang Sebatang Timur dan Desa Pinang Sebatang Barat.

Mengingat administrasi pemerintahan desa tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa maka penataan dan pengelolaan administrasi desa sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi aparat pemerintah desa khususnya data yang termuat dalam buku registrasi administrasi desa.

Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni *Administratie* yang berarti kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Hal ini didukung dengan pengertian yang telah diberikan oleh Sondang P. Siagian (2001:38) bahwa pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan menyusun dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam suatu hubungan satu sama lain. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam struktur dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Konsep Organisasi

Menurut (Siagian S. P., 2018) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerjasama dan terikat secara formal dalam rangka menjalankan untuk memperoleh tujuan yang telah ditetapkan dalam hubungan yang terdapat pada seseorang ataupun beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seorang atau kelompok orang yang dikenal sebagai bawahan.

Menurut Oliver Sheldon (1923) Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan, yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia.

Konsep Manajemen

Menurut (Siagian, 2018) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (1995: 3) mengemukakan definisi manajemen sebagai proses kerja sama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Konsep Tata Kelola

Tata kelola (*governance*) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu *civil society*. *Governance* merupakan sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan stakeholder (Asaduzzaman, 2020).

Konsep Desa

Desa secara etimologi berawal dari bahasa sansekerta, deca yang bermakna tanah air, kawasan asal atau kawasan kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Widjaja (2011:3) Desa merupakan kesatuan hukum masyarakat yang memiliki susunan asli dalam hak asal usul yang khusus. Keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah dasar pemikiran pemerintahan desa.

Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan administrasi yang dilakukan dalam lingkup desa disebut administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Penyelenggaraan dan pengembangan administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui: (1) Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register data; dan (2) Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan peristiwa yang terjadi. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang natural/alamiah yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dimana pada penelitian kualitatif, dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan dalam penelitian ini peneliti ikut terlibat langsung dengan informan. Salah satu alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena sifat dari masalah yang diteliti lebih cocok dengan metode ini. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2001:8) mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara kepada key informan dan informan yang berada di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas judul penelitian Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak maka peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

1) *Rule Of Law* (Kepastian Hukum)

Rule Of Law (Kepastian Hukum) yang berarti terjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pihak swasta terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung Desa Pinang Sebatang Timur kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang adanya jaminan kepastian hukum pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan :

“Ada, Namanya peraturan pembentukan dan mekanisme penyusunan dan mekanisme penyusunan peraturan data UU No 20 tahun 2017”

Berdasarkan hasil observasi penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasannya peraturan tata kelola administrasi pemerintahan desa itu ada, namun para pegawai kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur tata kelola administrasi desa. Namun fakta yang ditemukan oleh peneliti, desa memiliki surat keputusan penghulu kampung, dan apatur desa tersebut tidak memahami isian dari surat keputusan tersebut. Peraturan kebijakan yang dibuat oleh penghulu kampung juga mengacu kepada keputusan kebijakan dari pihak-pihak terkait.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas yang bermakna bertanggungjawab dan mempertanggung jawabkan segala aktivitas yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung Desa Pinang Sebatang Timur tentang adanya akuntabilitas pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan:

“Saya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, setiap ada perubahan pelayanan publik. agar masyarakat tahu dan lebih jelas memahaminya, dan dengan itu saya juga bisa menjemput aspirasi masyarakat, namun yang menjadi kendala pemerintah ialah belum bisa secara maksimal mematuhi aturan yang ada hal ini disebabkan karena kemampuan dan pengalaman dari aparatur pemerintah”.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pinang Sebatang Timur dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dari pemerintah desa selalu dilakukan baik itu pertanggungjawaban program yang dijalankan dan juga pertanggungjawab finansial secara ekonomis. Sebagian pegawai belum memahami secara benar peraturan yang mengatur kebijakan administrasi pemerintahan desa sehingga penjelasan masing-masing tentang penerapan tanggung jawab itu berbeda-beda.

3) Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung Desa Pinang Sebatang Timur kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang adanya keterbukaan informasi pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan:

“Untuk data informasi tidak di publish, apabila masyarakat membutuhkan data kami siap memberikan informasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Putriani selaku Kepala Urusan Umum Desa Pinang Sebatang Timur kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang adanya keterbukaan informasi pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan:

pertanyaan kepada, beliau menjawab :

“Terbuka, informasi tersebut disampaikan dengan berbagai cara, seperti melalui 1440embaga, rapat dengan berbagai 1440embaga masyarakat semacam RT/RW”.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terhadap key informan dan informan dapat disimpulkan tanggapan dari mereka tentang keterbukaan informasi administrasinya berbeda. Key Informan menyatakan bahwa informasinya diberikan bila dibutuhkan saja, sedangkan tanggapan dari beberapa informan bahwa informasi disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis.

4) *Profesionalisme*

Profesionalisme ialah individu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah berpengaruh pada penempatan jabatan atau rekrutmen pada organisasi apapun jenis, skala dan ukurannya, pasti tidak terlepas faktor sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang skill yang dimiliki pegawai pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan:

“Adapun skill yang dimiliki oleh pegawai di desa ini tergolong baik dalam pengerjaan tata kelola administrasi terlihat dari partisipasi masyarakat yang memberikan nilai baik kepada desa kami dan saya menjalankan administrasi ke pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi. Adapun kendala ialah pada tahap ini dalam pengelolaan administrasi di desa dimana masih terdapat ada beberapa pemerintah desa yang masih mengaitkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga hal ini membuat pekerjaan mereka berjalan tidak tepat waktu atau memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab mereka”.

Berdasarkan hasil observasi bahwasannya kemampuan pegawai dalam mengatur pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Desa Pinang Sebatang Timur penerapannya belum tercapai dengan baik, hal tersebut dapat terlihat dari timpang tindih jawaban dari key informan dan informan tersebut. Penulis menemukan bahwa pemerintah desa sementara ini bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari benturan pekerjaan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat secara umum, walaupun ada beberapa aparat pemerintah desa yang ditemukan di lapangan masih mengaitkan

pekerjaan umum dengan pekerjaan pribadi, sehingga yang menjadi tugas pokok diangkat sebagai pemerintah desa yang bekerja untuk masyarakat bisa dikatakan terabaikan.

5) Partisipasi

Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan atau keputusan pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan:

“Masyarakat ikut serta membuat kebijakan kampung di dalam penyusunan RKP karena masyarakat satu ide pemerintahan, dari masyarakat tidak bisa diputuskan oleh penghulu sendiri yang melibatkan suatu masukan dari bapokam, masyarakat ikut untuk rapat dan diskusi di desa ini baik rapat perencanaan maupun rapat yang bersifat umum, masyarakat disini ikut serta juga dalam mengawasi keuangan desa baik administrasi maupun antisipasi korupsi. Meski pemerintah desa membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai negeri)”

Berdasarkan hasil observasi bahwasannya masyarakat Desa Pinang Sebatang Timur berpartisipasi dalam kegiatan yang diberikan oleh Desa Pinang Sebatang Timur seperti mengikuti seminar terkait tata kelola administrasi desa dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan tentang analisis tata kelola administrasi Desa di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagai berikut:

Tata kelola administrasi Desa di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menurut hasil penelitian telah berjalan dengan baik berupa memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan atas kebijakan bagi masyarakat pada indikator kepastian hukum, Pihak desa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas kebijakan pada indikator akuntabilitas, pihak desa memiliki keterbukaan informasi dan menerima kritik dan saran dari masyarakat pada indikator transparansi, pihak desa memiliki kemampuan pada pegawainya dan para pegawai bertanggung jawab atas beban tugas dari pihak desa pada indikator profesionalitas, pihak desa melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan dan kebijakan pada indikator partisipasi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Siagian, S. P. (2018). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Siagian, S.

- Widjaja. (2002). *Pemerintahan desa dan administrasi desa*. raja grafindo: Jakarta.
- Widjaja, AW. (2004). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Zulkifli, A. A. (2013). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.
- Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 150-155.
- Alfitria, L., Sari, I., & Safitri, N. A. (2023). Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Melalui Tata Kelola Administrasi Desa. *Jurnal Haspi*, 2(2), 109-114.
- Herman, H., Tawakal, F., Indra, I., Puadji, F., Setianingsi, E., Sa'ban, L. A., & Hastuti, H. (2020). Pembinaan Administrasi Desa di Desa Wajajaya. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 87-94.
- Puadji, F., Setianingsi, E., Sa'ban, L. A., & Hastuti, H. (2020). Pembinaan Administrasi Desa di Desa Wajajaya. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 87-94.
- Ediwijoyo, S. P., Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2020). Meningkatkan pelayanan publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen dengan Sosialisasi dan Penyuluhan Tata Kelola Administrasi Desa. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 354-363.
- Sijaya, E. (2022). Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(03), 541-567.
- Waruwu, M. H., Gulo, S., Lahagu, P., Halawa, O., & Laia, O. (2023). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 44-47.
- Edy Sijaya. 2022. Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 14 No. 3.
- Fredik Djabu, Dkk. 2019. Tata Kelola Administrasi Desa Di Desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 5 No. 73.
- Rfli Pilo. 2022. Tata Kelola Administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 8 No. 121
- Putra, Hendi Sandi. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*.
- Heriyannto, Anas. 2015. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*.
- Sajangbati, Youla C. 2015. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.

- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.

- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.

- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.